

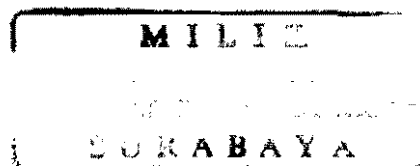
# SKRIPSI

**LIENDA HARLEYANI HAPSARI**

## **PENGANGKUTAN BARANG MELALUI LAUT MENGUNAKAN JASA INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDER**



Kk.  
Bag. 1/99  
Hap.  
P.



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA**

**1998**

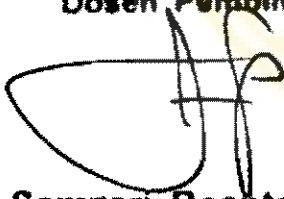
# **PENGANGKUTAN BARANG MELALUI LAUT MENGUNAKAN JASA INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDER**

## **SKRIPSI**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan  
Memenuhi Syarat-syarat untuk Mencapai  
Gelar Sarjana Hukum**

kk  
Des 17/99  
Hapsari  
P

**Dosen Pembimbing**



**H. Samzari Boentoro, S.H**  
**Nip. 130 350 728**

**Penyusun.**



**Lienda Harleyani Hapsari**  
**NIM : 039514082**

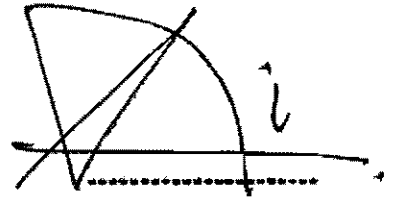
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA**

**1998**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada : 14 Desember 1998

Tim Penguji Skripsi :

KETUA : H. Anser Oemar Wongsodwirjo, S.H.



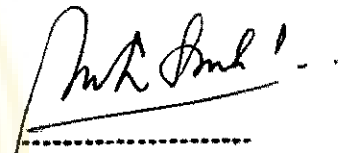
ANGGOTA :

1 H Samzari Boentoro, S.H.



2 Dra. Ec. Hj. Soendari Kabat, S.H., M.Hum.

3 Dr. M.L. Souhoka, S.H., M.S.



## BAB IV

### PENUTUP

#### **1. Kesimpulan**

- a) Terdapat dua kedudukan Freight Forwarder dalam hubungannya dengan Shipper yaitu F/F sebagai agen, dimana dia hanya mencari alat angkut bagi Shipper untuk mengangkut barang yang dipercayakan padanya sampai dengan ke tempat Consignee. Dalam kedudukannya ini maka hubungan antara Shipper dengan F/F adalah hubungan pemberian kuasa ( apabila F/F bertindak atas nama Shipper ) atau hubungan komisioner ( apabila F/F bertindak atas namanya sendiri untuk kepentingan Shipper ). Kedudukan F/F sebagai agen maka F/F mengadakan hubungan hukum dengan perusahaan -- perusahaan lain untuk kepentingan Shipper sehingga barang yang diserahkan padanya untuk diangkut sampai ke tangan Consignee. Dan F/F bertanggung jawab atas semua perusahaan yang ditunjuknya kepada Shipper. Sedangkan kedudukan F/F lainnya dalam hubungannya dengan Shipper adalah F/F sebagai Carrier itu sendiri untuk mengangkut barang sampai dengan ke tempat Consignee. Dalam kedudukannya ini maka hubungan hukum antara Shipper dengan F/F adalah hubungan yang diikat dengan perjanjian pengangkutan gabungan (pengangkutan dengan menggunakan berbagai macam alat angkut ). Hubungan lain dalam pengangkutan barang melalui laut menggunakan jasa International Freight Forwarder adalah hubungan antara Consignee dengan

F/F. Consignee berkedudukan sebagai pihak ketiga dalam perjanjian yang dibuat oleh Shipper dengan F/F sehingga berlakulah perjanjian tersebut padanya ( Consignee ).

Hubungan hukum para pihak yang terkait dalam pengangkutan barang melalui laut menggunakan jasa International Freight Forwarder pada dasarnya diikat dalam suatu perjanjian yang disepakati. Namun pada umumnya baik isi maupun bentuknya telah dibakukan, sehingga persyaratan yang tertera lebih banyak ditentukan oleh salah satu pihak saja, sehingga cenderung menekan pihak yang lemah.

- b) Asas kebebasan berkontrak adalah latar belakang yang memacu lahirnya standarisasi kontrak. Padahal kontrak baku tersebut mengandung kelemahan dimana tidak diterapkannya konsensus dalam arti yang sebenarnya dari kedua belah pihak secara sehat, melainkan hanya ditentukan sepihak. Standarisasi perjanjian seperti itu pada umumnya juga tidak menetapkan apa saja yang menjadi kewajiban pihak penyedia kontrak baku secara tegas, sehingga kerap menimbulkan kesan kurangnya keseimbangan perlindungan hak dan kewajiban bagi para pihak. Maka tak dapat disangkal lagi di dalam standart kontrak banyak dijumpai klausula – klausula eksemsi yang semata – mata bertujuan memperkecil tanggung jawab pihak pembuat perjanjian baku ( F/F ). Peristiwa kerusakan atau kekurangan barang – barang muatan merugikan pihak Shipper atau Consignee, ini dikarenakan mereka tidak akan memperoleh penyelesaian yang memadai. Sebab Shipper ataupun Consignee enggan memperkarakan perkara ini di pengadilan sehingga mereka hanya

mendapatkan ganti rugi menurut aturan yang dicantumkan pada kontrak baku yang tentu saja dibuat oleh F/F sendiri. Di sisi lain pihak F/F telah membentengi diri dengan klausula – klausula eksepsi yang berfungsi untuk menangkis pertanggungjawaban yang seharusnya dipikul apabila terjadi kegagalan pengangkutan. Apabila Shipper atau Consignee mengajukan klaim, sering diselesaikan dengan negosiasi ringan menurut aturan F/F. Jadi sangat jarang penyelesaian klaim tersebut mencuat ke pengadilan untuk dapat dibuat pegangan bagi penyelesaian kasus yang serupa di kemudian hari.

## **2. Saran**

- a) Pengangkutan barang melalui laut dengan menggunakan jasa International Freight Forwarder di Indonesia belum ada pengaturannya secara khusus, sehingga potensi terjadinya penyalahgunaan sangat dimungkinkan. Sebaiknya sebelum draft perjanjian dilempar ke pasaran hendaknya mendapatkan rekomendasi dari pihak yang berwenang dalam hal ini adalah Menteri Perhubungan. Supaya tidak memberikan kesan berat sebelah.
- b) Banyaknya anggapan negatif terhadap kontrak baku yang dibuat oleh F/F yang dianggap tidak pernah memberikan perlindungan pada pihak Shipper ataupun Consignee selaku pengguna jasa, maka di Indonesia perlu adanya perangkat undang – undang yang mengatur tentang tanggung jawab dan kewajiban bagi Freight Forwarder, untuk dapat dijadikan dasar pengaturan hubungan hukum para pihak yang terlibat yang memberikan kemudahan bagi para pihak untuk mendapatkan haknya serta mampu melaksanakan kewajibannya.